



PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati Adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.420.795.680.609 (Satu triliun empat ratus dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.128.499.880.200 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.550.000.000 (lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.562.500.000 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.937.380.200 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.550.000.000 (lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

(9) Pajak ...

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.100.000.000 (sepuluh milyar seratus juta rupiah);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.562.500.000 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.615.000.000 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.442.500.000 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.937.380.200 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Hasil Penjualan Aset Lainnya;
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan ...

- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Tunjangan;
dan
 - l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (seratus ratus juta rupiah);
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.187.380.200 (lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - (5) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - (7) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
 - (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 - (11) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - (12) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (13) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.206.922.697.812 (satu triliun dua ratus enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.152.684.263.000 (satu triliun seratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - e. Dana Insentif Daerah; dan
 - f. Dana Desa.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.463.811.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.706.486.730.000 (tujuh ratus enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.116.082.000 (seratus enam milyar seratus enam belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.231.527.675.000 (dua ratus tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.317.667.000 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.94.772.298.000 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat

miliar ...

milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.420.795.680.609 (Satu triliun empat ratus dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.068.103.576.890 (satu triliun enam puluh delapan milyar seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
- c. Belanja Pegawai;
 - d. Belanja Barang dan Jasa;
 - e. Belanja Bunga;
 - f. Belanja Subsidi;

g. Belanja ...

g. Belanja Hibah; dan
h. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.747.708.033.676 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.307.298.714.214 (tiga ratus tujuh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.688.829.000 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.408.000.000 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.157.819.992.963 (seratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.721.218.800 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.125.173.650 (tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.84.252.542.406 (delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja Modall Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.721.058.107 (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus ttujuh rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.393.508.656 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 172.478.602.100 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.811.250.000 (lima milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.667.352.100 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2022 terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.373.102.597 (tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih...

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.373.102.597 (tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 55.373.102.597) (lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp. 55.373.102.597) (lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
- i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,



Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



YUDHA REPENALDI RILIS

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.499.880.200
4.1.01	Pajak Daerah	55.550.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.800.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.800.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.800.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	350.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.500.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.500.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.500.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	800.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	7.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.100.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	10.100.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	10.100.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.562.500.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.615.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	500.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	500.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	70.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	70.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	420.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	420.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	442.500.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	262.500.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	32.500.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	200.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	55.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	55.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	505.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.450.000.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.450.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.450.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.937.380.200
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	100.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	100.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	20.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.000.000
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	4.000.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	4.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	200.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	475.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	380.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	380.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	95.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	95.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	59.187.380.200
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	59.187.380.200
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	59.187.380.200
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.206.922.697.812
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.684.263.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.056.594.298.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.463.811.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.570.411.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.748.438.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	611.935.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	484.668.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	129.533.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	706.486.730.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	706.486.730.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.116.082.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.172.939.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.788.179.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.850.939.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.538.082.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.449.523.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	13.529.880.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.119.771.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.045.170.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	661.323.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	15.073.957.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.141.252.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.279.402.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.353.679.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	20.262.208.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.851.446.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.573.128.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.326.750.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.798.454.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	231.527.675.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.771.400.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	134.746.264.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.860.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.822.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.076.700.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.613.832.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.306.725.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	238.550.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.930.539.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.480.700.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	599.195.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	280.700.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	1.317.667.000
4.2.01.02.01	DID	1.317.667.000
4.2.01.02.01.0001	DID	1.317.667.000
4.2.01.05	Dana Desa	94.772.298.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	94.772.298.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	94.772.298.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.238.434.812
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.238.434.812
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.594.049.465
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.640.173.621
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.616.454.186
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.127.645
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.290.629.895
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	15.000.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	15.000.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	15.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.350.422.578.012
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.068.103.576.890
5.1.01	Belanja Pegawai	747.708.033.676
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	440.947.767.953
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	334.844.181.307
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	315.444.715.659
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.399.465.648
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.490.785.479
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.379.028.502
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.111.756.977
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.730.389.506
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.730.389.506
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.430.879.783
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.319.690.783
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	111.189.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.160.840.110
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.974.877.510
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.185.962.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.276.221.167
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.739.144.916
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.537.076.251
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	439.490.665
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	434.111.313
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.379.352
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.436.901
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.028.642
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	408.259
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.296.586.901
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.384.899.469

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	911.687.432
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	812.005.189
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	765.252.333
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.752.856
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.459.950.945
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.319.798.545
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	140.152.400
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	105.467.986.130
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.277.210.883
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.277.210.883
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.750.499.190
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.750.499.190
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	100.440.276.057
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	88.042.440.913
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.397.835.144
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	146.138.538.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.777.500.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	140.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	17.500.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	65.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	125.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	40.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	505.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	525.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	113.125.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.250.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.100.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.600.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.875.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.650.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.500.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	66.250.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	150.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	2.250.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	134.746.264.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	134.746.264.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.860.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.860.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.641.649.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.711.299.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	930.350.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.512.663.865
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	914.597.250
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	914.597.250
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	91.459.725
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	91.459.725
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.326.166.013
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.326.166.013
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.297.049
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.297.049
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.007.651
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.007.651
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.416.200.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.416.200.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	774.900.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	774.900.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.007.485
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.007.485
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.258.110.983
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.195.033

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.585.100
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.249.330.850
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.419.167.709
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.419.167.709
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.750.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	153.750.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.656.819
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.267.680
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.267.680
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.310.075
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.310.075
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	483.128
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	483.128
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	288
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	288
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.589.363
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.589.363
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.971
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.971
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	404.914
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	404.914
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.000.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	554.894.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	132.594.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	132.594.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	422.300.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	422.300.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	16.749.632.769
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	16.749.632.769
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	16.749.632.769
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	21.141.894.140
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	21.141.894.140
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	21.141.894.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.298.714.214
5.1.02.01	Belanja Barang	78.662.850.101
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	78.662.850.101
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	106.833.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.454.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.429.865.263
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.553.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.050.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	32.130.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.642.474.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.885.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	19.385.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	325.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.068.552.470
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.304.494.179
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	144.799.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	134.790.495
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	726.210.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.725.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	239.120.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	57.200.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	876.246.740
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	45.529.522
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	81.369.102
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.125.518.800
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	8.627.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	132.106.180
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.269.611.950
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.411.392.800
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	98.254.300
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	35.882.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	158.025.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	204.600.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	167.155.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	333.300.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.250.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	9.000.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	900.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	169.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	136.860.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	97.755.279.079
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.623.868.600
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.613.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.859.483.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	417.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.300.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.500.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.800.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	722.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.330.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.832.660.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.700.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.138.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	485.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	45.800.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	94.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.048.675.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.749.288.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.663.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	379.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.332.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	206.750.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.200.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	863.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.750.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.992.500
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	26.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	747.633.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	328.024.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	153.745.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.565.850.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	169.192.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.089.261.100
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	80.915.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	508.200.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	81.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.496.752.979
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.781.262.720
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	5.129.432.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	930.188.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	289.223.996
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	221.009.450
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	133.636.813
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	12.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	5.000.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.837.499.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.145.720.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.600.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	140.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	532.679.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.727.055.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.863.710.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	80.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	722.345.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	61.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.090.000
5.1.02.02.06.0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	90.090.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.350.604.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	32.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	183.604.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.585.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	550.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	612.409.500
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	512.867.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	95.000.000
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	4.542.500
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.508.765.950
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.668.962.950
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	716.717.250
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	650.700.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	110.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	36.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.200.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.750.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	410.590.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	196.420.000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.200.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.400.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	25.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	19.500.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	124.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	7.135.700
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	350.000
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	90.000.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.916.543.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.101.047.000
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	3.100.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	696.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.811.700.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	923.260.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	900.000.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	23.260.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	57.340.915.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.340.915.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.931.610.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.409.305.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.479.499.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.218.015.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.170.600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	33.000.000
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	14.415.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	261.484.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	261.484.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.400.626.024
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.400.626.024
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.400.626.024

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.454.796.060
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.454.796.060
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.454.796.060
5.1.05	Belanja Hibah	11.688.829.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.866.219.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.048.979.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.605.800.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	443.179.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.817.240.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.817.240.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.866.100.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.866.100.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.866.100.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.408.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	18.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	18.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	18.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.390.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.390.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.390.000.000
5.2	BELANJA MODAL	157.819.992.963
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.721.218.800
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.896.750.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.896.750.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.750.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.815.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.731.967.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.583.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	31.583.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.700.384.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.699.684.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	700.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	696.130.650
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	696.130.650
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	600.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	96.130.650
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.824.301.438
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	687.082.338
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	260.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	427.082.338
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	809.058.100
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	339.672.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	275.620.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	193.766.100
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	328.161.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	39.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	55.236.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	14.025.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	88.400.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	131.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.748.391
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	24.748.391
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.149.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.600.391
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	15.999.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.415.186.600
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.415.186.600
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.415.186.600
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.661.899.998
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.661.899.998
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	27.500.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	185.780.000
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	148.620.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.299.999.998
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.982.906.623
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.511.871.520
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.511.871.520
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	471.035.103
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	256.129.953
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	149.496.190
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	65.408.960
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.680.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.680.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	4.680.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.081.958.100
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.081.958.100
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.081.958.100
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.400.690.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.400.690.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.400.690.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.125.173.650
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.935.173.650
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.899.683.650
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.263.607.250
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	289.999.800
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.346.076.600
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	35.490.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	35.490.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	190.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	190.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	190.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.252.542.406
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	74.422.098.434
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.925.076.472
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	62.925.076.472
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.497.021.962
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.497.021.962
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.815.813.972
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.746.903.972
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.691.903.972
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	55.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	814.600.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	814.600.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	254.310.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	254.310.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.630.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.630.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	14.630.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.721.058.107
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	36.175.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	30.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	30.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	6.175.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	6.175.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.684.883.107
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.684.883.107
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.684.883.107
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.393.508.656
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.393.508.656
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.393.508.656
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.393.508.656
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.393.508.656
5.4	BELANJA TRANSFER	172.478.602.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.811.250.000

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.555.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.555.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.555.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	256.250.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	256.250.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	256.250.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.667.352.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.667.352.100
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.667.352.100
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.667.352.100
	Jumlah Belanja	1.405.795.680.609
	Total Surplus/(Defisit)	(55.373.102.597)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.373.102.597
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.373.102.597
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	70.373.102.597
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	70.373.102.597
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	70.373.102.597
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.373.102.597
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000
	Pembiayaan Netto	55.373.102.597

Bupati Padang Pariaman

 SUHARTO BUR